

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stres kerja merupakan kondisi ketegangan yang berpengaruh terhadap emosi, jalan pikiran dan kondisi fisik seseorang. Stres kerja juga biasa diartikan dimana kondisi beberapa faktor di tempat kerja yang berinteraksi dengan pekerjaan sehingga mengganggu kondisi fisiologis dan perilaku pekerja. ⁽²⁸⁾

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah angkatan kerja di Indonesia diperkirakan sebesar 125,3 juta jiwa pada tahun 2014 atau naik 5,2 jutaan dibandingkan Tahun 2013. Tingkat partisipasi angkatan kerja di perkirakan sebesar 69,2% dan jumlah orang yang bekerja pada tahun 2014 mencapai 118,2 jiwa. Dapat disimpulkan bahwa meningkatnya angka angkatan kerja yang cukup besar sebagai sumber dari stres akibat kerja. ⁽¹⁾

Pada beberapa negara ada terdapat 8% penyakit yang ditimbulkan akibat kerja adalah stres kerja yang dikemukakan oleh WHO pada tahun 2014. Hasil penelitian *Labour Force Survey* pada tahun 2014 menemukan adanya 440.000 kasus stres akibat kerja di Inggris dengan angka kejadian sebanyak 1.380 kasus per 100.000 pekerja yang mengalami stres. ⁽¹⁾

Data hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesmas) tahun 2013 menunjukkan bahwa prevalensi penduduk Indonesia yang mengalami gangguan mental emosional atau stres adalah sebesar 6,0% atau sekitar 37,728 orang. Data ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan data hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesmas) tahun 2007 dimana prevalensi penduduk Indonesia pada penduduk umur ≥ 15 tahun yang mengalami gangguan mental emosional atau stres adalah sebesar 11,6 %. ⁽²⁹⁾

Stres kerja apabila dibiarkan terus menerus dialami oleh tenaga kerja, maka akan merugikan diri sendiri, pekerjaan, perusahaan maupun instansi serta masyarakat

dimana akan menurunkan produktifitas seseorang dalam bekerja dan produktifitas di tempat kerja juga akan menurun. Kerugian pada pekerja tidak hanya berhubungan dengan aktifitas kerja saja namun dapat meluas pada aktifitas diluar pekerjaan seperti susah tidur, selera makan berkurang hingga konsentrasi menurun.⁽²⁾

Dalam menanggulangi stres ditempat kerja perusahaan maupun instansi melakukan berbagai macam upaya seperti melakukan konseling klinis dan personal, uraian pekerjaan yang jelas, jaminan kerja seperti asuransi dan tunjangan kesehatan, jam kerja yang fleksibel, tempat atau sarana bagi tenaga kerja melakukan meditasi, berolahraga atau berkesenian, keterlibatan tenaga kerja dalam proses pengambilan keputusan dan perubahan di perusahaan maupun instansi, serta program-program yang terkait dengan perbaikan kesehatan tenaga kerja.⁽²⁹⁾

Pemerintah Indonesia dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan serta pengembangan kebijakan dibidang perlindungan sosial, dimulai pada tahun 2007 maka dilaksanakanlah Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada masyarakat miskin sebagai sarana untuk mengembangkan sistem jaminan sosial. Program penanggulangan kemiskinan serupa ini sudah dilaksanakan oleh beberapa Negara lain dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)* atau Bantuan Tunai Bersyarat.⁽²⁾

PKH diharapkan mampu mempercepat pencapaian target SDGs. Setidaknya ada 5 komponen SDGs yang secara tidak langsung akan terbantu oleh PKH yaitu pengurangan angka kemiskinan, pengurangan angka kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan kematian bayi dan ibu melahirkan.⁽²⁾ Menurut Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial, PKH dirancang untuk membantu penduduk miskin klaster terbawah berupa bantuan bersyarat untuk menanggulangi kemiskinan terutama dibidang pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan kualitas sumber

daya manusia.⁽³⁾ PKH merupakan salah satu program prioritas nasional yang dijadikan *centre of excellence* oleh Kementerian Sosial dalam menanggulangi kemiskinan secara kontinu.⁽⁴⁾

PKH pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007 di 7 Provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, NTT dan Sumatera Barat. Untuk Provinsi Sumatera Barat PKH pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan dan saat ini sudah mencakup sebanyak 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang mendapat bantuan PKH. Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu Kabupaten yang mendapatkan bantuan PKH.⁽⁴⁾ Kabupaten Sijunjung akan menjadi objek peneliti mengenai stres kerja pendamping PKH karena salah satunya adalah topografi Sijunjung yang sulit dan memiliki beban kerja tersendiri.

Berdasarkan data dari Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) didapatkan bahwa PKH di Kabupaten Sijunjung pertama kali dilaksanakan pada tahun 2010 sampai saat sekarang. Saat ini terdapat 8 kecamatan yang mendapat bantuan PKH di Kabupaten Sijunjung dengan total penerima bantuan sebanyak 8.137 peserta PKH. Dari 8 Kecamatan di Kabupaten Sijunjung, Kecamatan Kamang Baru memiliki peserta penerima bantuan PKH paling banyak dengan jumlah 1.525 peserta dan Kecamatan IV Nagari memiliki anggota peserta penerima bantuan PKH paling sedikit yaitu 215 peserta.

Masyarakat yang menjadi sasaran PKH adalah keluarga miskin secara ekonomi yang memiliki komponen berupa Ibu hamil/nifas, bayi, balita, anak sekolah hingga SMA, lansia dan anak disabilitas. Anggota keluarga yang memiliki anak berumur di bawah 21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar juga berhak menjadi peserta PKH, dengan syarat anak tersebut bersedia masuk sekolah.⁽⁴⁾

Keluarga yang menjadi peserta PKH memiliki hak untuk menerima bantuan tunai dengan syarat memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang harus dilakukan, yaitu untuk dibidang pendidikan anak usia sekolah kehadirannya harus mencapai 85%, dibidang kesehatan untuk ibu hamil dan balita wajib melakukan pemeriksaan kesehatan ke Posyandu. Selain itu peserta PKH diwajibkan untuk mengikuti kegiatan pertemuan kelompok yang diadakan sekali sebulan. Bagi peserta PKH yang tidak melakukan kewajiban yang sudah ditentukan maka dia akan dikeluarkan dari PKH.⁽⁴⁾

Agar terlaksananya PKH, maka Kementerian Sosial RI merekrut tenaga kerja yang disebut dengan Pendamping Sosial PKH yang akan ditempatkan disetiap kecamatan. Berdasarkan data dari UPPKH Kabupaten Sijunjung, pada tahun 2018 terdapat 32 orang Pendamping Sosial PKH, yang bertanggung jawab untuk mendampingi 200-300 peserta PKH perkecamatan dan memiliki tugas masing-masing terhadap wilayah dampungannya.

Tugas yang dilakukan oleh Pendamping Sosial PKH antara lain validasi, verifikasi fasilitas kesehatan, verifikasi fasilitas pendidikan, pemutakhiran data bulanan dan tahunan, penyaluran bantuan, melakukan pertemuan bulanan dalam format Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau *Family Development Session (FDS)* yang bertujuan untuk menciptakan perubahan perilaku, *home visit* ke rumah peserta PKH, pekerjaan insidental, pelaporan bulanan.⁽⁴⁾

Pendamping Sosial PKH dalam melaksanakan tugasnya memiliki tingkat kesulitan tersendiri karena mengharuskan Pendamping Sosial PKH untuk terjun langsung kelapangan dengan topografi Kabupten Sijunjung yang tergolong sulit untuk dilewati. Pendamping PKH dalam perjalanannya tak jarang harus melewati berbagai rintangan seperti menyebrangi sungai, melewati jalan setapak yang diiringi

jurang yang curam, melewati jalan berbatu, melewati hutan kecil di kaki bukit yang tidak terdapat tempat tinggal penduduk sama sekali serta susahny akses untuk berkomunikasi via telepon. Selain itu pekerjaan sebagai Pendamping Sosial PKH memiliki tugas yang banyak atau menumpuk, serta pengerjaannya dengan waktu yang *deadline*/pendek.

Setiap Pendamping Sosial PKH bertanggung jawab atas seluruh data dampungannya apabila terdapat permintaan data baru dari Kementerian Sosial RI maupun Dinas terkait. Tak jarang Pendamping Sosial PKH sering merasa kewalahan karena dalam waktu pengerjaannya yang terlalu singkat, dimana pada saat sedang mengentri data Pendamping Sosial PKH juga harus turun ke lapangan untuk memperoleh data yang *valid*.

Seperti pekerjaan lain pada umumnya, Pendamping PKH memiliki sumber dan tingkat stres pekerjaan tertentu. Tuntutan pekerjaan serta profesionalitas yang semakin tinggi menimbulkan tekanan-tekanan yang dihadapi oleh Pendamping PKH dalam lingkungan pekerjaan. Tekanan-tekanan yang ada berlangsung terus menerus sehingga berpotensi menimbulkan stres yang dirasakan oleh Pendamping Sosial PKH.⁽⁵⁾ Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kordinator PKH Kabupaten Sijunjung, stres kerja sering dialami oleh Pendamping PKH karena beban kerja yang tinggi. Beban kerja yang sering dialami oleh Pendamping Sosial PKH seperti pendataan yang disertai turun kelapangan dengan waktu pengerjaan yang singkat/*deadline*.

Koordinator PKH juga mengatakan bahwa Pendamping Sosial PKH yang memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun memiliki tingkat kinerja yang rendah, dan memiliki absensi kehadiran yang tinggi serta kurang bertanggung jawab sebagai Pendamping Sosial PKH. Selain itu dari beberapa Pendamping Sosial PKH memiliki

hubungan yang kurang baik dengan sesama rekan kerja dikarenakan beberapa masalah internal seperti gampang tersinggung, mudah marah, egois antar Pendamping PKH sehingga membuat sesama rekan kerja Pendamping Sosial PKH merasa tidak nyaman dan tidak bisa bekerja sama dengan baik. Selanjutnya dari wawancara yang dilakukan kepada 3 orang pendamping PKH ditemui pendamping merasa stres karena tuntutan pekerjaan yang tinggi dan beban kerja yang berat.

Adapun penelitian yang pernah dilakukan oleh Endah Sarwendah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada pendamping sosial di Panti Sosial Trensia Werdha Budi Mulia DKI Jakarta terhadap 30 responden dan didapatkan bahwa pendamping atau *caregiver* merasakan stress berjumlah 30 *caregiver* atau 100%. Penelitian ini juga mengatakan bahwa ada hubungan yang bermakna antara beban kerja dengan tingkat stres kerja pada Pendamping Sosial atau *caregiver* dengan ($p=$ value 0,001). Penelitian ini menjelaskan bahwa profesi sebagai pekerja sosial memiliki tingkat stres tersendiri.⁽⁶⁾

Penelitian tersebut menguatkan argumen yang menyatakan bahwa stres kerja akan berbeda-beda di tiap profesi. Secara umum pekerjaan dalam suatu instansi selalu menginginkan setiap pekerja berprestasi. Maka dalam mencapai tujuan ini, dalam bekerja dituntut untuk mampu menghadapi kesulitan baik didalam maupun diluar pekerjaan.⁽⁷⁾

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti ingin mengajukan judul penelitian tentang Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Stres Kerja Pada Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2018.

1.2 Perumusan Masalah

Stres kerja seharusnya menjadi perhatian bagi instansi terkait karena stres kerja juga akan berdampak pada instansi itu sendiri. Bekerja dalam kondisi stres kerja akan menurunkan produktivitas dan performa karyawan sehingga akan

merugikan perusahaan sendiri. Maka dari itu, stress kerja pada karyawan penting untuk dikaji pada penelitian ini.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: apakah terdapat hubungan beban kerja, masa kerja, dan hubungan interpersonal Pendamping Sosial PKH dengan kejadian stres kerja di Kabupaten Sijunjung Tahun 2018.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk diketahuinya hubungan beban kerja, masa kerja, dan hubungan interpersonal Pendamping Sosial PKH dengan stres kerja di Kabupaten Sijunjung Tahun 2018.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui distribusi frekuensi stres kerja pada Pendamping Sosial PKH di Kabupaten Sijunjung.
2. Mengetahui distribusi frekuensi beban kerja pada Pendamping Sosial PKH di Kabupaten Sijunjung.
3. Mengetahui distribusi frekuensi masa kerja Pendamping Sosial PKH di Kabupaten Sijunjung.
4. Mengetahui distribusi frekuensi hubungan interpersonal Pendamping Sosial PKH di Kabupaten Sijunjung.
5. Mengetahui hubungan beban kerja dengan stres kerja Pendamping Sosial PKH di Kabupaten Sijunjung.
6. Mengetahui hubungan masa kerja dengan stres kerja Pendamping Sosial PKH di Kabupaten Sijunjung.
7. Mengetahui hubungan hubungan interpersonal dengan stres kerja Pendamping Sosial PKH di Kabupaten Sijunjung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi tempat penelitian, diharapkan hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai implementasi PKH dan manajemen Pendamping terhadap pelaksanaan PKH.
2. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat, sebagai tambahan wacana dan informasi yang dapat memperluas pengetahuan dan pengkajian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan stres kerja pada Pendamping Sosial PKH.
3. Bagi peneliti, menambah wawasan dan informasi baru bagi peneliti dan dapat menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membatasi penelitian yang akan dilakukan karena terlalu luasnya pembahasan dalam penelitian dan mengingat terlalu banyaknya faktor yang mempengaruhi stres kerja, maka penulis hanya membatasi penelitian dengan melihat distribusi frekuensi beban kerja, masa kerja, dan hubungan interpersonal lalu menghubungkannya dengan stres kerja pada Pendamping Sosial PKH di Kabupaten Sijunjung. Peneliti juga membatasi tempat penelitian dimana peneliti akan melakukan penelitian pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Sijunjung.



